

PEMERINTAH KOTA BLITAR BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

RENCANA KERJA TAHUN 2022





BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Merdeka No. 105 Blitar Telepon: (0342) 801919 Email: bpkad@blitarkota.go.id Website: bpkad.blitarkota.go.id



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI]
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang	1 3 5 5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD S/D Tahun 2016	7
TABEL 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKAD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2018	g
TABEL 2. 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKAD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021	24
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	30 34
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	35 36 37
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	47
BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional	49 50
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPDTABEL 3.2 Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan	50 51
3.3 Program dan Kegiatan	51 51 52
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TABEL, 4.1 Sasaran BPKAD Tahun 2022 (Renstra 2021-2026) BAB V PENUTUP	53 55 63

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Jenjang perencanaan daerah terdiri dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 273 (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 13 Ayat (2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dalam pasal 16 Ayat (2) menyatakan Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Dengan demikian, pernyataan tahapan penyusunan Renja PD yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan utama pada paragraph kedua supaya disempurnakan.

Berdasarkan Pasal 126 Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Setelah disusun berdasarkan tahapan dan tatacara, maka rancangan Renja Perangkat Daerah disempurnakan menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor ... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar 2022 disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

- Berpedoman pada Renstra Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021- 2026 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju;
- 2. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja BPKAD tahun 2021 yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan / atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja BPKAD dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra BPKAD:
- Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi baik untuk tahun 2022 dan perkiraan maju tahun 2023;
- 4. Penyusunan Renja PD bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD 2022, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

1.1.1 Keterkaitan antara Renja PD dengan RKPD

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan, penyusunan renja salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman pada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja BPKAD Kota Blitar Tahun 2022 berpedoman kepada RKPD Kota Blitar tahun 2022.

1.1.2 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renstra Perangkat Daerah

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renja perangkat Daerah juga berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri nomor 87 Tahun 2017, disebutkan bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah. Ini artinya harus terdapat kesesuaian antara dokumen renstra dengan dokumen renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyususnan renja BPKAD Kota Blitar tahun 2022 juga berpedoman pada Rencana Strategis BPKAD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026

1.1.3 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renja Kementerian / Lembaga dan Renja Provinsi

Renja Kementerian/lembaga (Renja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) dan Renja Provinsi (Renja Badan Pendapatan Keuangan Provinsi Jawa Timur) tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Renja PD, seperti halnya Renstra maupun RKPD. Renja dan Tindak lanjutnya dalam APBD

Renja BPKAD Kota Blitar tahun 2022 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPKAD Kota Blitar Tahun 2022. Sedangkan RKA BPKAD Kota Blitar Tahun 2022 merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD Kota Blitar. Oleh karena itu Renja merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Kota Blitar Tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

Renja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar tahun 2022 berdasarkan pada :

- 1. Undang undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);
- 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Berita Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 470);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 590);
- 9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar tahun 2005 2025;
- 10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
- Peraturan Daerah Blitar Nomor 6 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016 – 2021(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6);

- Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 74);
- 13. Peraturan Walikota Blitar Nomor 39 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2021 nomor 39).

1.3 Maksud dan Tujuan

Disusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dimaksudkan untuk merumuskan rencana kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai berikut:

- Merupakan pedoman pelaksanaaan pelayanan Perangkat Daerah
- Sebagai penjabaran Rencana Kerja pemerintah daerah kota Blitar Tahun 2022;
- Sebagai pedoman pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- Sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

1.2 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Rencana Kerja BPKAD Tahun 2022 sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Isuisu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, menguraikan mengenai Telaahan terhadap
	kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Badan Perencanaan Pembangunan
	Daerah.
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
	menguraikan tentang program dan kegiatan dari Badan Perencanaan Pembangunan
	Daerah yang disertai dengan prakiraan maju tahun 2023
BAB V	Penutup, menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah -
	kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja Bappeda

tahun 2022

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Hasi; Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Guna memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKAD kota Blitar tahun lalu (2020) dan prakiraan capaian tahun berjalan (2021) dengan mengacu pada APBD tahun 2021. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun – tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah.

Adapun program Kegitan BPKAD Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2020 (n-2) dan tahun 2021 (n - 1) adalah sebagai berikut :

PROGRAM	KEGIATAN
Program Penunjang urusan Pemerintah	Penyusunan , penganggaran, dan evaluasi kinerja
Daerah Kabupaten / Kota	Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah
	Daerah

	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang										
	urusan Pemerintah Daerah										
	Penunjan pengelola Keuangan Daerah ng Urusan										
	Kewenanga										
Program Pengelolaan keuangan Daerah	Koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran										
	Daerah										
	Koordinasi dan pengelolaan Perbendaharaan										
	Daerah										
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan										
	pelaporan Keuangan Daerah										
Program Pengelola Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah										
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah										



Tabel. 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2021 (Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2020)

		<u> </u>		,		n Realisasi Kinerja Progi		<u> </u>	Perkiraan Reali	sasi Capaian Target
					К	egiatan Tahun Lalu (n-2)			Renstra SKPD	s/d Tahun Berjalan
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2021) Trib I (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
ı	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82,84)(100%	100%	100%	100%	88,31%	100%	288,31%	2,88
ı	Perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi perencanaan perangkat daerah yang telah disusun	16 dok	16 dok	16 dok	16 dok	16 dok	16 dok	16 dok	
2	Administrasi Keuangan PD	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daeerah sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	





					•	n Realisasi Kinerja Prog egiatan Tahun Lalu (n-2)				sasi Capaian Target s/d Tahun Berjalan
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2021) Trib I (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
		perangkat daeerah sesuai standar								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan unjangan ASN yang dibayarkan	76 orang	76 orang	76 orang	76 orang	76 orang	76 orang	76 orang	
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ semester / tribulanan SKPD	jumlah jenis dokumen evaluasi PD dan jumlah jenis dokumen renstra, renja PD	10 dok dan 6 dpk	10 dok dan 6 dpk	10 dok dan 6 dpk	10 dok dan 6 dpk	100%	257 porsi	1009 porsi	
3	Administrasi Kepegawaian PD	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian PD yang sesuai standar	100	100	100	100 r	100%	100	100	
	Pengadaan Pakaian dinas beserta atributnya	jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	76 orang	76 orang	76 orang	750 orang	100%	0	1500 orang	
	Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti dan jumlah publikasi yang diikuti.	5 Eveb, 3 publikasi	5 Eveb, 3 publikasi	5 Eveb, 3 publikasi	5 Eveb, 3 publikasi	100%	5 Eveb, 3 publikasi	5 Eveb, 3 publikasi	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan	100	100	100	100	100%	100	100	

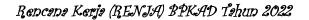


					_	n Realisasi Kinerja Prog egiatan Tahun Lalu (n-2)			Renstra SKPD	sasi Capaian Target s/d Tahun Berjalan
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2021) Trib I (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
	Penyediaan komponen instalasi / penerangan bangunan gedung	administrasi umum perangkat daerah sesuai standar jumlah jenis komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang tersedia	16 komponen	16 komponen	16 komponen	16 komponen	100%	16 komponen	100%	
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang terpenuhi.	8 macam	8 macam	08 macam	08 macam	100%	8 macam	100%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	16 macam	16 macam	16 macam	16 macam	100%	16 macam	16 macam	
	Penyediaan Bahan Logistik kantor	jumlah dos/kotak porsi makananan dan minuman yang tersedia dan jumlah jenis ATK yang tersedia	583 dos, 37 macam	583 dos, 37 macam	583 dos, 37 macam	583 dos, 37 macam	100%	583 dos, 37 macam	100%	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan yang tersedia, dan jumlah	12 cetakan , 45 macam	12 cetakan , 45 maca	12 cetakan , 45 macam	12 cetakan , 45 maca	100%	12 cetakan , 45 macam	100%	





						n Realisasi Kinerja Prog egiatan Tahun Lalu (n-2)				sasi Capaian Target s/d Tahun Berjalan
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2021) Trib I (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	lembar penggandaan jumlah bahan bacaan yang tersedia	3 bacaan	3 bacaan	8 macam	3 bacaan	100%	3 bacaan	100%	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsltasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	108 rakor	108 rakor 0	108 rakor	108 rakor	100%	108 rakor	100%	
5	Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	0	
	Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air, dan ;istrik	jumlah rekening yang terbayarkan	2 macam	2 macam	2 macam	2 macam	0	2 macam		
II	Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase peningkatan target pendapatan pajak daerah	30,45%	19,85%	20,00	19,85%	99,25	30,45%		
		Persentase peningkatan realisasi pajak daerah	30,45%	19,85%	20,00	19,85%		30,45%		



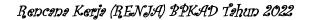


	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan				_	n Realisasi Kinerja Prog egiatan Tahun Lalu (n-2)			Renstra SKPD	sasi Capaian Target s/d Tahun Berjalan
Kode		Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2021) Trib I (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
6.	Pengelolaan pendapatan daerah	Jumlah dokumen penetapan pajak	100%					100%		
	Penilaian pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah data PBB P2 yang telah dimutakhirkan	50.000, SPPT		52276 wp	52276 wp	100	50.000, SPPT		
	Pengelolaan, Pemeliharaan, dan pelaporan Basis data pajak daerah	Jumlah paket sistem aplikasi pengelolaan sarana dan prasarana pajak daerah yang terpelihara	3, PLIKASI	3, PLIKASI	3, PLIKASI	3, PLIKASI	100	3, PLIKASI	100	
		Jumlah jenis pajak yang dimutakhirkan	6 BUAH	50 data	50 data	50 data	100	6 BUAH		
	Pendataan dan Pendaftaran obyek pajak daerah	jumlah jenis piutang pajak daerah	,9 JENIS PAJAK					9 JENIS PAJAK		
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang menyelesaikan kewajiban	49.095 WP	49095 wp				49.095 WP		
		Jumlah dokumen	215 DOK					215 DOK		





					•	n Realisasi Kinerja Prog egiatan Tahun Lalu (n-2)				sasi Capaian Target s/d Tahun Berjalan
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2021) Trib I (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
		keberatan wajib pajak daerah								
	Analisa dan Pengembangan Pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah dokumen rekapitulasi realisasi pendapatan daerah yang telah disusun	3 DOK					3 DOK		
	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah peserta sosialisasi publikasi pajak daerah	100 peserta							
		Jumlah dokumen keberatan wajib pajak daerah	215 dok							
III	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase peningkatan tertib perencanaan keuangan daerah	100%					100%		
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase rencana anggaran daerah yang telah dikoordinasikan dan disusun.	100%					100%		
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Aplikasi SIPEKS	1 APLIKASI	1 APLIKASI	1 APLIKASI	1 APLIKASI		1 APLIKASI		





					Target da	n Realisasi Kinerja Prog	ram dan		Perkiraan Reali	sasi Capaian Target
					К	egiatan Tahun Lalu (n-2))		Renstra SKPD	s/d Tahun Berjalan
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2021) Trib I (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
		Jumlah dokumen pengendalian anggaran yang tersusun	4 DOK	4 DOK	4 DOK	4 DOK		4 DOK	4 DOK	
5		Jumlah Dokumen penyusunan analisis standar belanja	1 DOK	1 DOK	1 DOK	1 DOK		1 DOK	1 DOK	
		Jumlah Dokumen rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah	4 DOK	4 DOK	4 DOK	4 DOK		4 DOK	4 DOK	
2	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perwal tentang Penjabaran APBD	2 DOK	2 DOK	2 DOK	2 DOK		2 DOK	2 DOK	
		Jumlah Aplikasi SIPAPBD	1 APLIKASI	1 APLIKASI	1 APLIKASI	1 APLIKASI		1 APLIKASI	1 APLIKASI	



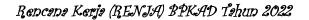


		Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)				n Realisasi Kinerja Prog egiatan Tahun Lalu (n-2)			Renstra SKPD	sasi Capaian Target s/d Tahun Berjalan
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2021) Trib I (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
		Jumlah Dokumen rancangan Perdda tentang p APBD dan rancangan Perwal tentang penjabaran P APBD	2 DOK	2 DOK	2 DOK	2 DOK	100	2 DOK	2 DOK	
		Jumlah peserta Bintek/ sosialisasi Penyusunan APBD	110 ORANG	90 org	90 org	90 org	100	110 ORANG	110 ORANG	
3	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Jumlah dokumen serapan anggaran kas yang telah Dipantau dan dievaluasi	272 DOK	544	544	544	100	272 DOK		
		Jumlah laporan dana perimbangan dan dana transfer lainnya yang dipantau dan dimonev	25 LAP					25 LAP		
		Jumlah laporan investasi dalir dan penyertaan modal yang dipantau dan dimonev	28 LAP	32	32	32	100	28 LAP	100	



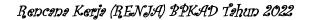


					_	n Realisasi Kinerja Prog egiatan Tahun Lalu (n-2)			Renstra SKPD	sasi Capaian Target s/d Tahun Berjalan
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2021) Trib I (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
		Jumlah pemeliharaan aplikasi SIPKD	1 APLIKASI	1 APLIKASI	1 APLIKASi	1 APLIKASI	100	1 APLIKASI	100	
		Jumlah Lembar SP2D dalam setahun	18.000					18.000		
4	Pembinaan penatausahaan keuangan Pemerintah Kabupaten		20.000					20.000		
		Jumlah dokumen SPP/ SPM yang diverifikasi jumlah dokumen SPP/SPM pembiayaan yang diverifikasi	2 DOK	15.000	15.000	15.000	100	2 DOK	100	
		Jumlah dokumen penggajian PNSD daerah Kota Blitar dalam setahun	6 DOK	1140	1140	1140	100	6 DOK	100	
		Jumlah dokumen penggajian PNSD daerah Kota Blitar dalam setahun	100 DOK					100 DOK		





					_	n Realisasi Kinerja Prog egiatan Tahun Lalu (n-2)			Renstra SKPD	sasi Capaian Target s/d Tahun Berjalan
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2021) Trib I (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
		Jumlah dokumen penggajian PNSD daerah Kota Blitar dalam setahun	720 DOK					720 DOK		
		Jumlah pengesahan dana BOS	684 DOK					684 DOK		
	Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK)	Jumlah dokumen SP3B yang diterbitkan	36 LAP					36 LAP		
		Jumlah laporan BUD yang disusun	245 LAP					245 LAP		
		Jumlah Laporan DTH yang disusun	24 LAP					24 LAP		
		Jumlah laporan posisi kas dan perkiraan belanja yang tersusun	24 LAP					24 LAP		
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan	Jumlah berita acara rekonsiliasi laporan	356 DOK					356 DOK		





					_	n Realisasi Kinerja Prog egiatan Tahun Lalu (n-2)			Renstra SKPD	sasi Capaian Target s/d Tahun Berjalan
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2021) Trib I (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
	Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	fungsional								
		Jumlah peserta yang melaksanakan rekonsiliasi belanja dan pendapatan OPD dan gaji	1068 LAP					1068 LAP		
	Penyiapan, pelaksanaan, pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah anggaran kas yang tersusun	2 DOK					2 DOK		
		Jumlah SPD yang diterbitkan	272 DOK					272 DOK		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan SAP dan kebijakan akuntansi	100%					100%		
	Penyusunan Tanggapan	Jumlah dokumen	1 DOK					1 DOK		





					_	n Realisasi Kinerja Prog egiatan Tahun Lalu (n-2)			Renstra SKPD	sasi Capaian Target s/d Tahun Berjalan
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2021) Trib I (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
	Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	tanggapan/Tindak lanjut LHP BPK atas laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD								
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 DOK					1 DOK		
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan akuntansi	1 DOK					1 DOK		
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan	1 DOK					1 DOK		
	Rekonsiliasi dan Verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan Beban	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD hasil Rekonsiliasi	402 DOK	402 DOK	402 DOK	402 DOK	402 DOK	402 DOK	100	
	Koordinasi dan penyusunan	Jumlah dokumen	2 DOK	2 DOK	2 DOK	2 DOK	2 DOK	2 DOK	100	





					_	n Realisasi Kinerja Prog egiatan Tahun Lalu (n-2)			Renstra SKPD	sasi Capaian Target s/d Tahun Berjalan
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2021) Trib I (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
	rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Propinsi dan Rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	rancangan peraturan daerah dan peraturan Walikota tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD								
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah	1 DOK					1 DOK		
	Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan semester	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya	1 DOK	1 DOK	1 DOK	1 DOK	1 DOK	1 DOK	100	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan, dan	Jumlah pembinaan/sosialisasi	100 ORG	100 ORG	100 ORG	100 ORG	100 ORG	100 ORG	100	





					_	n Realisasi Kinerja Prog egiatan Tahun Lalu (n-2)				sasi Capaian Target s/d Tahun Berjalan
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2021) Trib I (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
	Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	yang terlaksana								
IV	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase aset daerah yang diinventarisasi sesuai regulasi	30%					30%		
1.	Pengelolaan barang milik daerah	Jumlah aset daerah yang difasilitasi dalam rangka optimalisasi penggunaan BMD	2%					2%		
	Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah	Jumlah dokumen standarisasi harga barang dan jasa yang tersusun	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100	
	Penyusunan standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah	Jumlah dokumen RKBMD yang tersusun	1 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	1 dok		
	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Jumlah penilaian publik untuk pemanfaatan BMD	2 dok	1 BMD	1 BMD	1 BMD	1 BMD	2 dok	100	
	Penilaian barang milik	jumlah barang milik	1 KALI	50 data	50 data	50 data	50 data	1 KALI		





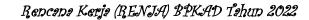
					_	n Realisasi Kinerja Prog egiatan Tahun Lalu (n-2)			Renstra SKPD	sasi Capaian Target s/d Tahun Berjalan
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2021) Trib I (%)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
	daerah	daerah yang diinventarisir								
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	jumlah dokumen yang diproses tindak lanjutnya	1 PAKET					1 PAKET		
	Penatausahaan Barang milik daerah	jumlah peserta yang melaksanakan kegiatan rekonsiliasi aset dalam 1 tahun	115 PESERTA					115 PESERTA		
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah dokumen laporan milik daerah se Kota Blitar	NA					NA		
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	jumlah peserta pembinaan pengelolaan barang milik daerah	150 ORG	100 org	100 org	100 org	100 org	150 ORG	100	
	Penyusunan standar Harga	jumlah dokumen standarisasi harga barang dan jasa yang tersusun	2 dok					2 dok		



Tabel. 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan pendapatan keuangan dan aset Daerah Kota Blitar
dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2021 (Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sampai dengan tahun 2021 – Sesuai Permendagri
90 Tahun 2019)

				90 ranur	1 20 13)					
				Realisasi Capaian		nerja dan Angg a Blitar Tahun	Lalu	- Target	Realisasi Kinerja dan	Tingkat Capaian
Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		1D Kota Blitar hun 2021	Kinerja RPJMD Kota Blitar sampai dengan RKPD Kota Blitar Tahun 2020	Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2021)	Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021	Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase peningkatan tertib perencanaan keuangan daerah	100	%					100	0	0 %
Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Persentase rencana anggaran daerah yang telah dikoordinasikan dan disusun.	100	%					100	0	0 %
Koordinasi penyusunan dan verifikasi perubahan RKA - SKPD	Jumlah Aplikasi SIPEKS	1	APLIKASI					4	0	0 %
	Jumlah dokumen pengendalian anggaran yang tersusun	4	DOK					4	0	
	Jumlah Dokumen penyusunan analisis standar belanja	1	DOK					1	0	
	Jumlah Dokumen rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah	4	Dok					4		
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah aplikasi SIPAPBD	1	aplikasi					1		
	Jumlah dokumen rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perwal tentang Penjabaran APBD	2	dok					2		
	Jumlah dokumen rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perwal tentang Penjabaran PAPBD	2	dok					2		





	Jumlah peserta bintek osialisasi penyusunan APBD	110	peserta	110	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	persentase penyerapan anggaran diatas 85 %	92	%	92	
Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	Persentase perangkat daerah yang penyerapan anggarannya di atas 85 %	92	%	92	
Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Jumlah dokumen serapan anggaran kas yang telah Dipantau dan dievaluasi	272	dok	272	
	Jumlah laporan dana perimbangan dan dana transfer lainnya yang dipantau dan dimonev	25	LAP	25	
	Jumlah laporan investasi dalir dan penyertaan modal yang dipantau dan dimonev	28	LAP	28	
	Jumlah pemeliharaan aplikasi SIPKD	1	APLIKASI	1	
Pembinaan penatausahaan keuangan Pemerintah Kabupaten	Jumlah dokumen SPP/ SPM yang diverifikasi	20.000	lbr	20.000	
	jumlah dokumen SPP/SPM pembiayaan yang diverifikasi	2	DOK	2	
	Jumlah dokumen penggajian PNSD daerah Kota Blitar dalam setahun (indikator ini ditulis ulang sebanyak 3 kali)	6	DOK	6	
	Jumlah dokumen penggajian PNSD daerah Kota Blitar dalam setahun	100	dok	100	
	Jumlah dokumen penggajian PNSD daerah Kota Blitar dalam setahun	720	dok	720	
	Jumlah pengesahan dana BOS	684	dok	684	
Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan	Jumlah dokumen SP3B yang diterbitkan	36	lap	36	





penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK)							
	Jumlah laporan BUD yang disusun	245	LAP			245	
	Jumlah Laporan DTH yang disusun	24	lap			24	
	Jumlah laporan posisi kas dan perkiraan belanja yang tersusun	24	lap			24	
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Jumlah berita acara rekonsiliasi laporan fungsional	356	DOK			356	
	Jumlah peserta yang melaksanakan rekonsiliasi belanja dan pendapatan OPD dan gaji	1068	lap			1068	
Penyiapan, pelaksanaan, pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah anggaran kas yang tersusun	272	dok			272	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	persentase penyusunan laporan keuangan daerah tepat waktu	100	%			100	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan SAP dan kebijakan akuntansi	100	%			100	
Penyusunan Tanggapan Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen tanggapan/Tindak lanjut LHP BPK atas laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	dok			1	
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1	dok			1	
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan akuntansi	1	dok			1	



Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan	1	dok			1	
Rekonsiliasi dan Verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan Beban	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD hasil Rekonsiliasi	402	okd			402	
Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Propinsi dan Rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rancangan peraturan daerah dan peraturan Walikota tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	2	dok			2	
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah	1	dok			2	
Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan semester	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya	1	dok			2	
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah pembinaan/sosialisasi yang terlaksana	100	org			100	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase aset daerah yang diinventarisasi sesuai regulasi	30	%			30	
Pengelolaan barang milik daerah	Jumlah aset daerah yang difasilitasi dalam rangka optimalisasi penggunaan BMD	2	%			2	
Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah	Jumlah dokumen standarisasi harga barang dan jasa yang tersusun	2	unit			2	



Penyusunan standar barang	Jumlah dokumen RKBMD yang	1	dok	1		1		
milik daerah dan standar	tersusun	ı	uok			ļ		
kebutuhan barang milik daerah	tersusuri							
Penyusunan perencanaan	Jumlah penilaian publik untuk	2	dok			2		
kebutuhan barang milik daerah	pemanfaatan BMD	2	dok			2		
Penilaian barang milik daerah	jumlah barang milik daerah yang	1	kali			1		
Termidian barang minik daeran	diinventarisir	'	Kali			'		
Inventarisasi Barang Milik	jumlah dokumen yang diproses	1	PAKET			1		
Daerah	tindak lanjutnya	•	174421					
Penatausahaan Barang milik	jumlah peserta yang melaksanakan	115	PESERTA		1	15		
daerah	kegiatan rekonsiliasi aset dalam 1							
	tahun							
Penyusunan Laporan Barang	jumlah peserta pembinaan	150	org		1	50		
Milik Daerah	pengelolaan barang milik daerah							
Penyusunan Kebijakan	jumlah dokumen kebijakan	1	dok			1		
Pengelolaan Barang Milik	pengelolaan barang milik daerah							
Daerah								
Pembinaan Pengelolaan Barang	jumlah peserta pembinaan	150	org		1	50		
Milik Daerah Pemerintah	pengelolaan barang milik daerah							
Kabupaten/Kota								
Penyusunan standar Harga	jumlah dokumen standarisasi harga	2	okd			2		
	barang dan jasa yang tersusun							
PROGRAM PENUNJANG	Nilai SKM	Baik			В	aik	0	0%
URUSAN PEMERINTAHAN								
DAERAH KABUPATEN / KOTA								
Perencanaan, Penganggaran,	Persentase penyusunan dokumen	100	%		1	00	0	0%
dan Evaluasi Kinerja	perencanaan dan pelaporan yang							
Perangkat Daerah	tepat waktu dan sesuai standar							
Evaluasi kinerja Perangkat	Jumlah jenis dokumen perencanaan	10	dokumen		1	0	6	
Daerah	Perangkat Daerah yang tersusun							
Administrasi Keuangan	Persentase pelayanan administrasi	100	%		1	00	50	50%
Perangkat Daerah	keuangan perangkat daerah sesuai							
	standar							
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	76	orang		7	76		50%
ASN	yang dibayarkan							
Penyediaan administrasi	Jumlah pejabat pengelola keuangan	117	orang		1	17		50%
pelaksanaan tugas ASN	dan pengelola barang daerah yang							
	menerima honorarium							



Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah jenis laporan Keuangan yang Tesusun (bulanan / semesteran)	11	dokumen		11	1	%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	%		100	0	0%
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya	76	Buah		76		
Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah even Daerah dan hari besar nasional yang diikuti	5	even		5	0	0%
	Jumlah publikasi program / kegiatan perangkat daerah	3	publikasi		3	0	0%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	%		100	50%	%
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	16	Macam		16		%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang terpenuhi	8	macam		8	0	0%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	10	macam		10	4	0%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos / kotak / porsi makanan dan minuman yang tersedia	563	dos		563		%
	Jumlah Jenis alat tulis kantor yang tersedia	38	macam		38	0	%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang tersedia	12	Cetakan		12		%
	Jumlah lembar penggandaan		lembar				%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	3	Bacaan		3		%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	108	rakor		108		%



Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100	%			100	0	0%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	55	unit			55		%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara	5	macam			5		%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	2	jenis			12	8	66,7%

Sumber: BPKAD Kota Blitar Tahun 2021

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi BPKAD Kota Blitar, dapat diketahui dengan melakukan analisa dengan metode SWOT, dapat diuraikan sebagai berikut:

2.2.1. Strength (Kekuatan),

- Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, dimana BPKAD meliputi bidang pendapatan, keuangan dan aset daerah sehingga menjadi lebih kaya fungsi dengan diisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- 2. Adanya dukungan OPD terhadap upaya peningkatan Pajak Daerah dan Pengelolaan PAD;
- 3. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah Kota Blitar, melakukan evaluasi terhadap Raperda tentang APBD/Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar serta Rancangan Peraturan KDH tentang Pejabaran APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Blitar:
- 4. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
- 5. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup memadai dengan ditunjang latar belakang pengalaman dan pendidikan yang cukup;
- 6. Memiliki sarana, prasarana dan sistem informasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD.

2.2.2. Weaknes (kelemahan),

- Diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pada tahun anggaran berjalan dan tidak dibarengi dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi;
- 2. Belum optimalnya penggalian data sumber-sumber potensi Pendapatan Daerah;
- 3. Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak belum optimal;

- 4. Adanya lembaga/instansi yang masih memiliki keinginan (egosektoral) untuk menjadi arus utama dalam suatu program dan kegiatan tanpa memperhatikan sektor-sektor yang ada;
- Masih adanya beberapa pegawai yang kurang memiliki kepedulian, memahami etos kerja dan tanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi BPKAD serta masih kurangnya disiplin kerja;
- 6. Belum optimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal/ informal yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi;
- 7. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi serta terbatasnya kesempatan pegawai untuk meningkatkan keahlian, kemampuan dan wawasan, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2.2.3. Opportunity (peluang),

- 1. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun rancangan APBD/rancangan Perubahan APBD, mengesahkan DPA-SKPD, menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah. Untuk itu, BPKAD mempunyai fungsi strategis dalam rangka fasilitasi SKPD melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah;
- 2. Sesuai Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 305 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa untuk menunjang kelancaran, konsistensi dan sinkronisasi penyusunan APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Blitar serta kepatuhan dan

- ketaatan terhadap peraturan yang lebih tinggi, masing-masing Raperda Kota Blitar disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi;
- Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dimana BPKAD selaku koordinator PAD terutama Pajak Daerah memiliki kewenangan dalam penetapan pajak dan melakukan monitoring dan evaluasi dan pengelolaan PAD pada Unit Kerja Penghasil.
- 4. Sebagai Fungsi Koordinator Pengelola Barang Milik Daerah BPKAD memegang peranan penting dalam berkoordinator dengan OPD mulai dari perencanaan kebutuhan barang, pemanfaatan barang sampai pada inventarisir barang daerah.
- 5. Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah, maka BPKAD Kota Blitar diharapkan dapat lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Blitar terkait dengan perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2.2.4. Treath (ancaman),

- Banyaknya PNS yang memasuki Masa Purna Pensiun (MPP). Oleh karena itu, untuk kedepan diperlukan adanya tambahan PNS baru yang memiliki dedikasi, loyalitas, kualitas dan kompetensi yang tinggi sesuai latar belakang pendidikannya dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi BPKAD;
- Semangat yang berlebihan (euphoria) terhadap pelaksanaan reformasi dan otonomi daerah, yang seringkali menimbulkan pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku antara Eksekutif dan Legislatif, namun kurang memperhatikan dan mempertimbangkan dinamika yang berkembang;
- 3. Dengan telah diraihnya Opini WTP 10 kali berturut-turut oleh BPK atas LKD Kota Blitar mengharusnya BPKAD beserta OPD lebih cermat dan teliti dalam penyusunan Laporan Keuangan berbasis Akrual. Akan tetapi hal ini tidak diimbangi dengan jumlah SDM Pengelolaan Akuntansi di BPKAD dan SDM di masing-masing OPD yang berkompeten dalam hal penyusunan Laporan Keuangan (Tim Akuntansi).
- 4. Kurang tertibnya dan lengkapnya data yang disampaikan oleh OPD terkait Inventarisasi Barang yang ada, yang memungkinkan hilangnya beberapa aset peralatan dan mesin

karena sulitnya menemukan informasi tahun perolehan, jenis barangnya dan harga perolehannya.

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) tahun 2019. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik.

Penjelasan tersebut dapat diuraikan pada Tabel 2.3 sebagai berikut :



Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kota Blitar

					Та	rget Renstra SK	PD			Realisasi Capaia	n	Proy	/eksi	
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun		Tahun	Tahun	Tahun 2020	Tahun	Tahun	Outstan Ameliais
NO	Indikator	SPM/Stan dar	IKK	2018	2019	2020	2021	Tahun 2022	2018	2019	Tanun 2020	2021	2022	Catatan Analisis
		Nasional		(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)		(thnn-2)	(%)		(thn)	(thnn+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ı	Persentase kontribusi Pendapatan Pajak Daerah terhadap PAD		-	19,80%	19,85%	19,90%	20,00%	%	126,00%	136,02%	19,85%	19,90%	20%	Persentase Kontribusi Pajak terhadap PAD tahun 2019 melampui target karena didalamnya selain realisasi pajak tahun berjalan juga adanya realisasi piutang pajak daerah.
2	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu		-	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	
3	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Kota Blitar		-	8 Minggu	8 Minggu	8 Minggu	8 Minggu		100%	100%	8 minggu	8 minggu	8 minggu	
4	Persentase Perangkat Daerah yang penyerapan anggarannya di atas 90 persen		-	91%	92%	93%	94%		53,33%	52,75%	71,16%	93%	94%	Penyerapan anggaran diatas 90% masih belum memenuhi target karena masih banyaknya OPD yang belum menyelesaikan pencairan dia akhir tahun disebabkan efisiensi anggaran dan adanya gagal lelang serta keterbatasan waktu pelaksanaan pencairan
5	Persentase pemberdayaan aset		-	94%	95%	96%	97%		380,00%	0	0	0	0	Dilihat dari proporsi nilai aset tetap yang digunkan untuk operasional.
	Persentase Perangkat daerah yang menyampaikan Neraca Barang Daerah tepat waktu			0	0	0	0		106,38%	105,26%	104,16 %	96%	97%	Hasil riviu SAKIP dilakukan pengantian IKU BPKAD menjadi Persentase perangkat daerah yang menyampaikan Neraca Barang Daerah tepat waktu

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu – isu atau permasalahan – permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan nilai-nilai yang berkembang, situasi dan kondisi baik dari lingkungan internal maupun eksternalnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi dalam penatausahaan keuangan;
- 2. Kurangnya pemahaman aparatur dalam memahami peraturan perundangan yang berlaku;
- 3. Belum optimalnya koordinasi pengelolaan barang daerah sebagai bahan penyusunan laporan keuangan daerah;
- 6. Belum optimalnya pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah di beberapa Perangkat Daerah;
- 7. Masih rendahnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah dari sebagian pejabat pengelola keuangan Perangkat Daerah;
- 8. Belum optimalnya penguasaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan di masing-masing Perangkat Daerah;
- 9. Perlunya produk hukum terbaru berkaitan dengan terbitnya berbagai regulasi baru tentang pajak daerah seperti Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan Standar Operasional Prosedur mengenai pajak daerah;
- 10. Masih belum optimalnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah, di sebabkan belum adanya Tim Pemeriksa Pajak Daerah;
- 11. Masih terdapatnya piutang pajak baik yang masih dapat ditagih maupun yang sudah kedaluarsa yang belum terselesaikan.

Permasalahan tersebut terjadi karena faktor – faktor yang mempengaruhi antara lain :

- 1. Kurangnya kesempatan aparatur untuk mengikuti pelatihan pelatihan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan;
- 2. Sering terjadinya perubahan peraturan pengelolaan keuangan daerah;
- 3. Lemahnya koordinasi pengelolaan barang daerah, pengelolaan akuntansi dan dokumen pelengkap sebagai bahan penyusunan laporan keuangan daerah;

- 4. Masih rendahnya kedisiplinan dan ketaatan SKPD dalam pelaksanaan anggaran;
- 5. Adanya moratorium pegawai;
- 6. Tidak lengkapnya berkas pendukung sebagai syarat administrasi penghapusan piutang.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, misalnya rumusan program dan kegiatan baru yang terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan sudah sesuai namun besarannya berbeda.

Pada Riview Rancangan Awal RKPD ada beberapa indikator kegiatan yang belum dimasukkan guna memujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Blitar, yaitu indikator pengintregrasian Aplikasi , penambahan belanja modal softwere untuk aplikasi pengelolaan keuangan tingkat Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus barang serta Pengelolaan Informasi publik untuk kegiatan Financial On Clinic, kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan , Rapat koordinasi pengelolaan hibah bansos dan kerugian daerah.

Penjelasan tersebut dapat diuraikan pada Tabel 2.4 sebagai berikut :

Rencene Kerje (RENJA) BPKAD Tehun 2022



Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 Kota Blitar

Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			0-4-4
No	Program / Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikati Rp	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp.	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Kota Blitar	Persentase Kecukupan pelayanan perkantoran	100%		Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota pemerintahan	Kota Blitar	Persentase Kecukupan pelayanan perkantoran	100%	10.856.864.729	
1	Kegiatan Administrasi Keuangan		Jumlah dokumen pelayanan perkantoran	100%	9.889.245.490.	Kegiatan Administrasi Keuangan		Jumlah dokumen pelayanan perkantoran	100%	9.419.144.329	
	Subkegiatan . Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah ASN yang menerima gaji		9.889.245.490	Subkegiatan . Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan		9,419.144.329	
			Jumlah Gaji dan yunjangan ASN			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ semesteran/ tribulanan		Jumlah jenis dokumen evaluasi PD dan jumlah jenis dok renstra, dan renja PD	100	3.549.200	
	Sub kegiatan Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		Jumlah pejabat pengelola keuangan dan pengelolaan barang daerah yang menerima honorarium		1.181.710.000	Sub kegiatan Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		Jumlah pejabat pengelola keuangan dan pengelolaan barang daerah yang menerima honorarium		0	
	Subkegiatan Penyusunan laporan keuangan bulanan / semesteran		Jumlah jenis laporan keuangan yang tersusun		3.549.200	Subkegiatan Penyusunan laporan keuangan bulanan / semesteran		Jumlah jenis laporan keuangan yang tersusun		0	
2	Kegiatan Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah dokumen yang tersusun	100%	8.087.400	Kegiatan Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah dokumen yang tersusun		18.086.400	
	Subkegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen renstra dan renja		4.972.000	Subkegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah jenis dokumen evaluasi perencanaan PD yang telah disusun Dan jumlah jenis dok renstra dan renja PD		18.086.400	
						Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				72.	



	Subkegiatan Penyusunan dokumen evaluasi	Jumlah jenis dokumen evaluasi perangkat daerah		3.115.400				
	perangkat daerah	ovalidasi perangkat daeran						
	Kegiatan Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah kecukupan pelpenuhi ayanan perkantoran	100%					
	Sub kegiatan pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari hari tertentu yang terpenuhi		7.597.800	Sub kegiatan pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari hari tertentu yang terpenuhi		7.500.000
	Subkegiatan sosialisasi peraturan perundang undangan	Jumlah event daerah dan hari nasional yang diikuti		65.518.700	Subkegiatan sosialisasi peraturan perundang undangan	Jumlah event daerah dan hari nasional yang diikuti		65.235.500
3	Kegiatan Administrasi Umum	Jumlah kecukupan pelayanan perkantoran	100%		Administrasi Umum	Jumlah kecukupan pelayanan perkantoran	100%	
	Subkegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan		59.992.300				
	Subkegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan dibayarkan perijinannya		28.205.000				
	Subkegiatan Penyediaan Alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia		23.070.000				
	Subkegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersdia		369.158.338	Subkegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersdia		320.116.600
		Jumlah Lembar penggandaan				Jumlah Lembar penggandaan		
	Subkegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia		13.402.500	Subkegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia		13.383.600
	Subkegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peraturan rumah tangga kantor yang tersdia		3.836.600	Subkegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peraturan rumah tangga kantor yang tersdia		12.140.400
	Subkegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia		11.980.000	Subkegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia		11.970.000
	Subkegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia		8.370.100	Subkegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia		68.364.500



Subkegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah dos / kotak makanan dan minuman yang tersedia		45.298.600				
Subkegiatan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti		349.212.100	Subkegiatan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti		450.791.700
Subkegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi		27.292.700	Subkegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi		51.052.900
Subkegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi		3.000.000				
				Pemeliharaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			
				Subkegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan		101.520.000
				Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			
				Subkegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan dibayarkan perijinannya		111.046.000
				Sub keg pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara		19.199.000
				Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara		131.713.300
Subkegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah Kendaraan dinas / operasional yang terpelihara		83.050.400				
Subkegiatan Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara		20.111.400				
Subkegiatan Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara		19.252.800				
Program pengelolaan Barang milik daerah	Persentase penyajian data keuangan dan aset daerah	95%	1.324.665.900	Program pengelolaan Barang milik daerah	Persentase penyajian data keuangan dan aset daerah	95%	1.324.665.900
Subkegiatan koordinasi dan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang	Jumlah dokumen standarisasi harga barang dan jasa yang tersusun		435.463.600	Subkegiatan penyusunan standar standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah	Jumlah dokumen standarisasi harga barang dan jasa yang tersusun		150.000.000

Rencene Kerje (RENJA) BPKAD Tehun 2022



Subkegiatan Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah dokumen yang diproses tindaklanjutnya		759.202.300	Subkegiatan Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah dokumen yang diproses tindaklanjutnya		397.250.500
				Sub kegiatan penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Jumlah dokumen RKBMD yang tersusun		15.900.000
				Penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah	Jumlah kebijakan barang milik daerah		199.175.100
	Jumlah dokumen daftar kebutuhan barang yang tersusun				Jumlah dokumen yang diproses tindak lanjutnya		197.250.500
	Jumlah aset daerah yang terfasilitasi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah				Jumlah barang milik daerah yang diinventarisir		100.000.000
	Jumlah penilaian publik atas sewa BMD				Jumlah penilaian publik untuk pemanfaatan BMD		100.000.000
	Jumlah barang daerah yang terinventarisir			Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah	Jumlah aset daerah yang terfasilitasi dalam rangka optimalisasi penggunaan BMD		609.582.228
	Jumlah dokumen hasil penilaian barang milik daerah			Penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah se kota blitar		246.000.000
	Jumlah peserta yang melaksanakan kegiatan rekonsiliasi aset dalam 1 tahun			Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah peserta yang melaksanakan kegiatan rekonsiliasi aset dalam 1 tahun		90.900.000
	jumlah dokumen rekonsiliasi aset dalam 1 tahun			Pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kab/kota	Jumlah peserta pembinaan pengelolaan barang milik		132.745.800
	Jumlah peserta pembinaan pengelolaan barang milik daerah				Jumlah peserta pembinaan pengelolaan barang milik		
Program pengelolaan keuangan daerah	Jumlah perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100%		Program pengelolaan keuangan daerah	Jumlah perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100%	
Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akntansi dan pelaporan keuangan daerah	Jumlah perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100%	497.445.400	Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akntansi dan pelaporan keuangan daerah	Jumlah perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100%	535.965.400
Subkegiatan koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD hasil rekonsiliasi		91.340.800	Subkegiatan koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, tribulanan, semester	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya		47.701.900



Sub kegiatan koordinasi	Jumlah dokumen rancangan	 	123.716.800	Sub kegiatan koordinasi dan	Jumlah dokumen	Γ	122.926.500
dan penyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD propinsi dan kab/kota	perda walikota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD			penyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD propinsi dan kab/kota	rancangan perda walikota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		
Subkegiatan konsolidasi laporan keuangan SKPD , BLUD dan laporan keuangan Pemda	Jumlah laporan keuangan konsolidasi	1 dok	749.200	Subkegiatan konsolidasi laporan keuangan SKPD , BLUD dan laporan keuangan Pemda	Jumlah laporan keuangan konsolidasi	1 dok	1.328.000
Sub kegiatan penyusunan tanggapan / tindak lanjut terhadap LHP BPK , laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen tanggapan / tindak lanjut LHP, BPK, atas laporan	1 dok	275.800	Sub kegiatan penyusunan tanggapan / tindak lanjut terhadap LHP BPK , laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen tanggapan / tindak lanjut LHP, BPK, atas laporan	1 dok	917.800
Subkegiatan penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 dok	260.000	Subkegiatan penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen analisis laporan pertanggungjawaban	1 dok	902.400
Subkegiatan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosisi untuk 6 bulan berikutnya	1 dok	48.061.900	Subkegiatan rekonsiliasi dan verifikasi aset , kewajiban,ekuitas , pendapatan belanja pembiayaan , pendapatan LO dan beban	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD hasil rekonsiliasi	402 dok	113.381.000
Subkegiatan penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi penerintah daerah	Jumlah dokumen kebijakan akuntansi	1 dok	151.220.000	Subkegiatan penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi penerintah daerah	Jumlah dokumen kebijakan akuntansi	1 dok	176.187.000
Subkegntah daerah iprosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemeriatan penyusunan sistem dan	Jumlah dokumen sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan	1 dok	58.498.200	Subkegiatan penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	Jumlah dokumen sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan	1 dok	57.918.200
	Upgrade sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	1 dok			Upgrade sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	1 dok	
Subkegiatan pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah	Jumlah pembinaan / sosialisasi yang terlaksana	100 org	23.322.300	Subkegiatan pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah	Jumlah pembinaan / sosialisasi yang terlaksana	100 org	14.702.300

Rencene Kerje (RENJA) BPKAD Tehun 2022



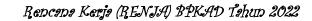
. Kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	Jumlah OPD yang melaksanakan tertib penatausahaan keuangan daerah	95 %		Kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	Jumlah OPD yang melaksanakan tertib penatausahaan keuangan daerah	95 %	
Subkegiatan Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Jumlah dokumen serapan anggaran kas yang dimonitoring dan dievaluasi	272 dok	5.000.000	Subkegiatan Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Jumlah dokumen serapan anggaran kas yang dimonitoring dan dievaluasi	272 dok	206.010.500
Subkegiatan koordinasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Jumlah laporan dana perimbangan dan dana transfer lainnya yang dimonev	25 lap	159.946.400	Subkegiatan koordinasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Jumlah laporan dana perimbangan dan dana transfer lainnya yang dimonev	25 lap	
	Jumlah laporan investasi dalir dan penyertaan modal yang dimonev	28 lap			Jumlah laporan investasi dalir dan penyertaan modal yang dimonev	28 lap	
	Jumlah pemeliharaan aplikasi SIPKD	1 aplikasi			Jumlah pemeliharaan aplikasi SIPKD	1 aplikasi	
					Jumlah lembar SP2D dalam setahun	18.000 lbr	
Subkegiatan pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D	Jumlah lembar SP2D dalam setahun	20.000 lbr		Sub kegiatan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan atas SP2D denngan instansi terkait	Jumlah berita acara rekonsiliasi laporan fungsional	356 BA	64.356.300
					Jumlah lap fungsional belanja dan pendapatan OPD	1068 lap	
Subkegiatan koordinasi pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM , pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji serta penerbitan SKPP	Jumlah dokumen penggajian PNSD pemerintah daerah kota blitar dalam setahun	6 dok	122.944.000	Subkegiatan koordinasi pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/ kota	Jumlah dokumen rekon PT taspen dan BPJS kota blitar dalam setahun	6 dok	191.446.100
	Jumlah dokumen penggajian PNSD pemerintah daerah kota blitar dalam setahun	100 dok			Jumlah dokumen SKPP kota blitar dalam setahun	100 dok	
	Jumlah dokumen penggajian PNSD pemerintah daerah kota blitar dalam setahun	720 dok			Jumlah dokumen SP2B BLUD yang diterbitkan	12 dok	
	Jumlah dokumen SPP/SPM pembiayaan yang diverifikasi	10.000 dok			Jumlah dokumen SP2B BOS dalam setahun	684 dok	



		Jumlah pengesahan dana	684 dok			jumlah dokumen SPP/SPM	720 dok		
		Bos				gaji yang diverifikasi	47.000 1.1		
						Jumlah dok SPP/SPM non	17,280 dok		
	 					gaji yang diverifikasi Jumlah surat edaran /	2 dok		
						petunjuk teknis	2 dok		
						penatausahaan			
	Subkegiatan koordinasi penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Jumlah dokumen SP3B yang diterbitkan	36 Iaporan	2.449.400	Subkegiatan koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah , laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (FPK)	Jumlah dokumen SP3B yang diterbitkan	36 dok	2.449.400	
		Jumlah laporan BUD yang tersusun	245 lap			Jumlah laporan BUD yang tersusun	245 lap		
		Jumlah laporan DTH yang tersusun	24 lap			Jumlah laporan DTH yang tersusun	24 lap		
		Jumlah laporan posisi kas dan perkiraan belanja yang tersusun	24 lap			Jumlah laporan posisi kas dan perkiraan belanja yang tersusun	24 lap		
	Subkegiatan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah berita acara rekonsiliasi leporan fungsional	356 dok	2.449.400	Subkegiatan koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah , laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (FPK)	Jumlah dok SP3B	36 dok	2.449.400	
						Jumlah laporan BUD yang disusun	245 lap		
						Jumlah laporan DTH yang disusun	24 lap		
						Jumlah lap posisi kas dan perkiraan belanja yang tersusun	24 lap		
		Jumlah peserta yang	1068 lap			Jumlah peserta yang	1068 lap		
		melaksanakan rekonsiliasi	'			melaksanakan rekonsiliasi			
		belanja dan pendapatan OPD				belanja dan pendapatan OPD			
		Jumlah SPD diterbitkan	272 dok			Jumlah SPD diterbitkan	272 dok		
3	Kegiatan Koordinasi dan	Ketepatan waktu penyusunan	8 minggu		Kegiatan Koordinasi dan	Ketepatan waktu	8 minggu		
	penyusunan rencana	RAPBD Kota Blitar			penyusunan rencana	penyusunan RAPBD Kota			
	anggaran daerah				anggaran daerah	Blitar			



Sub kegiatan Penyusunan dan Reviw RKA SKPD / Perubahan RKA SKPD	Jumlah aplikasi SIPEKS	1 aplikasi	402.829.300	Sub kegiatan Penyusunan dan Reviw RKA SKPD / Perubahan RKA SKPD	Jumlah aplikasi SIPEKS	1 aplikasi	546.709.300
	Jumlah dokumen pengendalian anggaran yang tersusun	4 dokumen			Jumlah dokumen pengendalian anggaran yang tersusun	4 dokumen	
	Jumlah dokumen penyusunan analisis standar belanja	1 dokumen			Jumlah dokumen penyusunan analisis standar belanja	1 dokumen	
	Jumlah dokumen rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah	4 dokumen			Jumlah dokumen rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah	4 dokumen	
Subkegiatan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah aplikasi SIPAPBD	1 aplikasi	936.444.100	Subkegiatan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah aplikasi SIPAPBD	1 aplikasi	1.124.964.600
	Jumlah dokumen rancangan perda tentang APBD dan rancangan perwali tentang penjabaran APBD	2 dokumen			Jumlah dokumen rancangan perda tentang APBD dan rancangan perwali tentang penjabaran APBD	2 dokumen	
	Jumlah dokumen rancangan perda tentang PAPBD dan rancangan perwali tentang penjabaran PAPBD	2 dokumen			Jumlah dokumen rancangan perda tentang P APBD dan rancangan perwali tentang penjabaran P APBD	2 dokumen	
	Jumlah pesert bintek / sosialisasi penyusunan APBD	110 peserta			Jumlah pesert bintek / sosialisasi penyusunan APBD	110 peserta	
Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase peningkatan target pajak daerah	48 %	2.821.777.950	Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase peningkatan target pajak daerah	48 %	2.838995.150
Kegiatan Pengelolaan pendapatan daerah	Persentase pendapatan pajak daerah terhadap PAD			Kegiatan Kegiatan Pengelolaan pendapatan daerah	Persentase pendapatan pajak daerah terhadap PAD		
Subkegiatan Analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah (penagihan)	Jumlah dokumen potensi sumber sumber pendapatan daerah	3 dok	148.843.200	Subkegiatan Analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah daerah	Jumlah dokumen potensi sumber sumber pendapatan daerah	3 dok	162.154.100
Subkegiatan Penagihan pajak daerah (penagihan)	Jumlah jenis piutang pajak daerah	5 pajak	1.021.000.400	Subkegiatan penagihan i pajak daerah	Jumlah jenis piutang pajak daerah	5 pajak	1.225.593.700
	Jumlah wajib pajak yang menyelesaikan kewajiban	49095 WP			Jumlah wajib pajak yang menyelesaikan kewajiban	49095 WP	
Subkegiatan Pelayanan dan Konsultasi pajak	Jumlah dokumen keberatan wajib pajak daerah	215 dok	196.603.600	Subkegiatan Pelayanan dan Konsultasi pajak daerah	Jumlah dokumen keberatan wajib pajak daerah	215 dok	201.876.000





daerah (penagihan)							
	Jumlah peserta sosialisasi publikasi pajak daerah	100 org			Jumlah peserta sosialisasi publikasi pajak daerah	100 org	
Subkegiatan Pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah pendataan)	Jumlah jenis pajak yang dimutakhirkan	9 jenis	172.682.150	Subkegiatan Pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah	Jumlah jenis pajak yang dimutakhirkan	9 jenis	215.502.350
Subkegiatan pengolahan pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah (pendataan)	Jumlah data PBB P- 2 yang telah dimutakhirkan	50.000 SPT	804.383.300	Subkegiatan pengolahan pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	Jumlah data PBB P- 2 yang telah dimutakhirkan	50.000 SPT	555.603.700
	Jumlah media publikasi himbauan pajak daerah BPKAD	6 buah			Jumlah media publikasi himbauan pajak daerah BPKAD	6 buah	
	Jumlah paket sistem aplikasi pengelolaan sarana dan prasarana daerah yang terpelihara	3 aplikasi			Jumlah paket sistem aplikasi pengelolaan sarana dan prasarana daerah yang terpelihara	3 aplikasi	
Subkegiatan penilaian pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) (Pendataan)	Jumlah dokumen penetapan pajak	47950 WP	478.265.300	Subkegiatan penilaian pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	Jumlah dokumen penetapan pajak	47950 WP	478.265.300

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 75 Tahun 2016 tentang tugas, pokok, fungsi dari BPKAD adalah melakukan pengelolaan dari fungsi Pendapatan daerah dari Sektor Pajak, Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk Tahun 2022 dari Pengelolaan pendapatan lebih difokuskan pada peningkatan Pajak daerah melalui Pengembangan Sistem Aplikasi Pendapatan utamanya PBB, BPHTB, Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terintegrasi dengan metode pembayaran non tunai, hal ini telah didukung dengan adanya kerjasama dengan Pihak Bank, untuk memudahkan pembayaran para Wajib Pajak melalui Mobile Banking keliling, SMS Banking. Hal ini sejalan dengan Rencana Kerja Kementerian Keuangan kaitannya dengan terjaganya kesinambungan fiskal untuk meningkatkan Penerimaan fiskal negara.

Sedangkan dari Pengelolaan Keuangan BPKAD di Tahun 2022 memfokuskan diri pada Pengelolaan Akuntansi tingkat bawah yaitu tertib penatausahaan dan entry data oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang serta mengaktifkan fungsi dari PPTK dan PPK di masing-masing Bidang. Monitoring dan evaluasi serapan anggaran terkait dengan pemberlakuan Transaksi Non Tunai dan paperless dokumen pencairan, hal ini dikarenakan fungsi verifikasi dari kebenaran/keabsahan dokumen belanja/pencairan (kuitansi, nota belanja dll) berada di verifikator masing-masing OPD. Mulai dilakukannya survey pemutakhiran data Aset di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Blitar.

Untuk Pengelolaan di bidang perencanaan, akuntansi dan aset yang umumnya bersifat rutin setiap tahun, akan lebih ditingkatkan dalam segi administratif, membina OPD untuk lebih tertib dan cermat dalam menyusun Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Invetarisasi Barang Daerah.



Lampiran 4 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kota Blitar

N	10	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		NIHIL				

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun Program Pembangunan Nasional (Propenas). Propenas merupakan rencana induk pembangunan perencanaan nasional hasil konsensus dan komitmen bersama masyarakat Indonesia yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa. Dengan demikian, fungsi Propenas adalah untuk menyatukan pandangan dan derap langkah pemerintahan daerah di seluruh Indonesia dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun kedepan.

Untuk mendorong pelaksanaan fungsi tersebut perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi makro, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas-tugas desentralisasinya, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Sebagai penjabaran kebijakan program nasional dan untuk mensinergikan pelaksanaan program pembangunan daerah Pemerintah Kota Blitar menyusun Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu kepada Propenas dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan kedua hal tersebut, untuk mewujudkan keselarasan antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, masing-masing Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda), walaupun dimungkinkan adanya perbedaan prioritas menurut kebutuhan daerah dengan pendekatan bersifat strategis dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang baik, memperkuat landasan pembangunan yang adil dan berkelanjutan serta meningkatkan pembangunan daerah. Untuk program kegiatan di daerah terlebih dahulu perlu dilakukan identifikasi terhadap kebijakan nasional, sebagai berikut:

No.	KebijakanNasional	Sumber	Keterangan
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	APBN	

2	Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah	APBN	
3	Kapasitas Keuangan Daerah	APBN	
4	Peningkatan Kerjasama Antar Daerah	APBN	

Dari keempat kebijakan tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar, maka dalam menyusun program kegiatannya BPKAD Kota Blitar mengacu pada kebijakan nasional "Kapasitas Keuangan Daerah", sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja BPKAD pada tahun-tahun sebelumnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah.

Dengan memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan **tujuan, sasaran dan indikator sasaran** yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Indikator Tujuan dan Formula perhitungan (Renstra 2016 - 2021)

	FORMULA	Target	Realisasi	Tar	get
INDIKATOR	PERHITUNGAN	20)20	2021	2022
Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	Jumlah PAD dibagi jumlah pendapatan dikalikan 100%	19,90%	19,85	20,00%	-
Persentase penyusunan dokumen keuangan daerah yang tepat waktu	Jumlah dokumen keuangan yang tepat waktu dibagi jumlah dokumen keuangan yang harus disusun kali 100%	100%	100%	100%	

Sumber: Bpkad Kota Blitar Tahun 2021

Tabel 3.2. Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan (Renstra 2021 - 2026)

	FORMULA PERHITUNGAN	Target	Realisasi	Ta	rget
INDIKATOR		20	20	2021	2022
Persentase Peningkatan PAD	Jumlah PAD dibagi Jumlah Pendapatan X 100 %	19,90%	19,85%	30,45%	31,45%
Persentase tertib penyusunan dokumen keuangan	Jumlah perangkat daerah yang tertib laporan keuangan dibagi jumlah perangkat daerah dikali 100 %	100%	100%	100%	100%
Persentase peningkatan system pengelolaan asset daerah	Jumlah jenis asset tetap yang diinventarisir dibagi jumlah jenis asset tetap dikali 100%	20%	20%	25%	30%

Sumber : Bpkad Kota Blitar Tahun 2021

Tabel 3.3
Sasaran Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 (Renstra 2016 - 2021)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tai	rget
			2	020	2021	2022
1	Meningkatnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD	Persentase pendapatan pajak daerah terhadap PAD	19,90%	19,85%	20,00	
2	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien dan taat peraturan perundang undangan yang berlaku	Persentase perangkat daerah yang pengelolaan keuangannya tertib	100%	100%	100%	
		Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Kota Blitar	8 minggu	100%	8 mingg u	
		Persentase perangkat daerah yang penyerapan anggarannya diatas 90%	93%	66,17%	94%	

Persentase perangkat daerah yang menyanpaikan neraca barang daerah tepat waktu	96%	100%	97%	

Sumber: Bpkad Kota Blitar Tahun 2021

Tabel. 3.4. Sasaran Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 (Renstra 2021 – 2026)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisas	Tar	get
		•	2	020	2021	2022
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Peningkatan PAD	19,90	19,85	30,45%	31,45%
		Persentase tertib penyusunan dokumen keuangan	100%	100%	100%	100%
		Persentase peningkatan system pengelolaan asset daerah	20%	100%	25%	30%

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan lebih spesifik dan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.

BAB IV

RENCANA PROGRAM , KEGIATAN, INDIKATOR, LOKASI, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaskanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai instrumen untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan.

Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di BPKAD Kota Blitar diarahkan untuk mencapai visi dan misi Walikota Blitar sehingga program dan kegiatan dalam Renja BPKAD kota Blitar merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Walikota Blitar.

2. Pencapaian SDG's

Sustainable Development Goals merupakan kesepakatan dari negara – negara di dunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ketiga yang kondisi ekonomina masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya.

Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara – negara yang ikut menandatangani SDG's, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target SDG's. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target – target SDG's ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja BPKAD Kota Blitar diimplementasikan untuk mencapai target – target SDG's.

3. Pemberantasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara – negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota

sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memnuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan malah glbal yang butuh perhatian serius.

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Blitar. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2021 diarahkan pada upaya peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat serta penguatan infrastruktur kota.

Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan BPKAD Kota Blitar tahun 2022 adalah 9 program dan 27 kegiatan. Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel berikut :



Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan maju Tahun 2023 Kota Blitar

										Frakiraan maju ranun	LULU INOIU	Diitai					
					Urusan/Bidang Urusan				Renca	na Tahun 2022				Catat an Penti ng	Perkiraan Maju	ı Rencana Ta	hun 2023
	K	ODE			Pemerintahan			Lokasi		Target Capaian Kinerja		_	_	9	Target Capaian K	ineria	
		ODL			- Daerah dan Program Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub kegiatan	Output Kegiata	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sum ber Dana		Tolok Ukur	Target	- Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp.)
		(1)			(2)	(4)		(5)		(6)			(7)	(8)	(9)		(10)
5	02	01			Program penunjang urusan pemerintahan Daerah kab/kota	100%		Kota Blitar	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah kab/kota								10.434.909.494
			2.01		Perencanaan pengganngaran dan evaluasi kinerja PD	100	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar			persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		18.086.400			persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100	18.086.400
				07	Evaluasi kinerja perangkat daerah					Jumlah jenis dokumen evaluasi perencanaan PD yang telah disusun	10 dok	18.086.400			Jumlah jenis dokumen evaluasi perencanaan PD yang telah disusun	10 dok	8.087400
										Jumlah jenis dokumen renstra dan renja PD	6 dok				Jumlah jenis dokumen renstra dan renja PD	6 dok	
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan perangkat daerah	Persentase pelayanan administras i keuangan perangkat daeerah sesuai standar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daeerah sesuai standar		100%	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daeerah sesuai standar					Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daeerah sesuai standar		
5	02	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN					Jumlah ASN yang menerima gaji	76 org	9.419.144.3 29	APBD		Jumlah ASN yang menerima gaji	76 org	9.419.144.329
										Jumlah gaji dan tunjangan ASN	76 org				Jumlah gaji dan tunjangan ASN	76 org	
5	02	01	2	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan, bulanan/tribulanan, semester SKPD					Jumlah jenis dokumen evaluasi PD	10 dok	3.549.200			Jumlah jenis dokumen evaluasi PD	10 dok	3.549.200
										Jumlah jenis dokumen renstra, renia PD	6 dok				Jumlah jenis dokumen renstra, renja PD	6 dok	
5	02	01	2.08		Administrasi Umum PD	Persentase kecukupan pelayanan	Persentase kecukupan pelayanan		100%	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%						



						perkantora n	perkantoran						
5	02	01	2	.01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor		Jumlah	Jumlah rekening yang terbayarkan	2 macam	59.992.300	Jumlah rekening yang terbayarkan	2 macam	59.992.300
								Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan dibayarkan pajaknya	49 unit	28.205.000	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan dibayarkan	49 unit	28.205.000
5	02	01	2	03.10	Penyediaan alat tulis kantor								
				05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Jumlah barang cetakan yang tersedia	12 cetakan	320.116.60 0	Jumlah barang cetakan yang tersedia	12 cetakan	546.900.000
					. 55			Jumlah lembar penggandaan	45 macam		Jumlah lembar penggandaan	45 macam	
				03.12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bengunan kantor			Jumlah jenis komponen instalasi listrik / bangunan kantor yang tersedia	16 komponen	13.381.900	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / bangunan kantor yang tersedia	16 komponen	13.750.000
				03	Penyediaan peralatan rumah tangga			Jumlah jenis peralatan umah tangga kantor yang tersedia	16 jenis	11.874.600	Jumlah jenis peralatan umah tangga kantor yang tersedia	16 jenis	12.500.000
				06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan			Jumlah bahan bacaan yang tersedia	3 bahan bacaan	11.970.000	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	3 bahan bacaan	12.000.000
				04	Penyediaan bahan logistik kantor			Jumlah dos/kotak makanan minuman r yang tersedia	6 macam	68.364.500	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	6 macam	68.850.000
				03.17	Penyediaan makanan dan minuman			Jumlah dos/ kotak makanan dan minuman yang tersedia	583 dos	45.298.600	Jumlah dos/ kotak makanan dan minuman yang tersedia	583 dos	45.298.600
								Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	37 macam		Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	37 macam	
				09	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	108 rakor	450.791.70 0	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	108 rakor	450.000.000
				02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor			Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang terpenuhi	8 macam	74.161.200	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang terpenuhi	8 macam	74.161.200
5	02	01	2.08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	2 macam		persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	2 macam	
				02	Penyediaan jasa komunikasi , sumber dava air listrik			Jumlah rekening yang terbayarkan	2 macam	101.520.00 0	Jumlah rekening yang terbayarkan	2 macam	76.890.000
5	02	01	2.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan			Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar		261.958.10			157.655.400



				00	pemerintah daerah			harden handeren	C	111.06.000	lumlah lum danan	C	111.255.400
				02	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	6 unit	111.06.000	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang	6 unit	111.255.400
					pemeliharaan ,pajak			dinas/operasional yang terpelinara			terpelihara		
					dan perijinan						terpeliliara		
					kendaraan dinas								
					operasional atau								
					lapangan								
					iapangan								
								Jumlah kendaraan dinas/	49 unit		Jumlah kendaraan dinas/	49 unit	
								operasional yang terpelihara dan			operasional yang		
								dibayarkan perijinannya			terpelihara dan		
											dibayarkan perijinannya		
				06	Pemeliharaan			Jumlah peralatan gedung kantor	5 macam	19.199.000	Jumlah peralatan gedung	5macam	19.900.000
					peralatan dan mesin			yang terpenuhi			kantor yang terpenuhi		
					lainnya								
				.10	Pemeliharaan sarana			Jumlah perlengkapan gedung	2 jenis	131.713.30	Jumlah perlengkapan	2 jenis	26.500.000
					dan prasarana gedung			kantor yang terpelihara		0	gedung kantor yang		
					kantor atau bangunan						terpelihara		
					lainnya								
5	02	01	2.05		ADMINISTRASI	Persentase	Persentase	Persentase pelayanan	-	101.946.00	Persentase pelayanan		73.340.000
٦	02	01	2.03		KEPEGAWAIAN pd	pelayanan	pelayanan	administrasi kepegawaian PD		101.540.00	administrasi		73.340.000
					KEI EOAWAIAN pu	administras	administrasi	yang sesuai standar		ı "	kepegawaian PD yang		
						i	kepegawaian PD	yang sesaai standai			sesuai standar		
						kepegawaia	yang sesuai				occur cianda		
						n PD yang	standar						
						sesuai							
						standar							
				02	Pengadaan pakaian			Jumlah pakaian dinas dan	76 buah	31.755.000	Jumlah pakaian dinas dan	76 buah	7.640.000
					dinas beserta atribut			kelengkapannya yang tersedia			kelengkapannya yang		
					kelengkapannya						tersedia		
				10	Sosialisasi peraturan			Jumlah event dan hari besar	5 event	70.191.000	Jumlah event dan hari	5 event	65.700.000
					perundang undangan			nasional yang diikuti			besar nasional yang		
											diikuti		
								Jumlah publikasi yang diikuti	3 publikasi		Jumlah publikasi yang	3 publikasi	
_	00	00			PROGRAM	Darsart	Dereente	Descentage and describerate	 		diikuti		-
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase	Persentase aset	Persentase aset daerah yang			Persentase aset daerah		
					BARANG MILIK	aset daerah	daerah yang diinventarisasi	diinventarisasi sesuai regulasi	I		yang diinventarisasi		
					DAERAH	yang diinventarisa					sesuai regulasi		
					DAERAN	si sesuai	sesuai regulasi						
						regulasi			1				
			2.01		Pengelolaan Barang	Jumlah aset	Jumlah aset	Jumlah aset daerah yang	-	2.041.553.6	Jumlah aset daerah yang		2.652.051.500
					Milik Daerah	daerah yang	daerah yang	difasilitasi dalam rangka		28	difasilitasi dalam rangka		
						difasilitasi	difasilitasi dalam	optimalisasi penggunaan BMD	I		optimalisasi penggunaan		
						dalam	rangka				BMD		
						rangka	optimalisasi				1		
						optimalisasi	penggunaan						
						penggunaan	BMD						I
J	ı					porigguriadir			1				



				02	Penyusunan standar				Jumlah dokumen standarisasi	2 dok	150.000.00	Jumlah dokumen	2 dok	124.810.600
					barang milik daerah				harga barang dan jasa yang		0	standarisasi harga barang		
					dan standar kebutuhan				tersusun			dan jasa yang tersusun		
					barang milik daerah									
				03	Penyusunan				Jumlah dokumen RKBMD yang	2 BMD	15.900.000	Jumlah dokumen RKBMD	2 BMD	17.900.000
					perencanaan				tersusun			yang tersusun		
					kebutuhan barang milik									
					daerah									
				04	Penyusunan kebijakan				Jumlah kebijakan barang milik	1 dok	199.175.10	Jumlah kebijakan barang	1 BMD	1.402.439.000
					pengelolaan barang				daerah		0	milik daerah		
					milik daerah									
				05	Penatausahaan barang				Jumlah dokumen yang diproses	1 paket	397.250.50	Jumlah dokumen yang	1 paket	
					milik daerah				tindak lanjutnya		0	diproses tindak lanjutnya		
				06	Inventarisasi Barang				Jumlah barang milik daerah yang	1 kali	100.000.00	Jumlah barang milik	1 kali	110.000.000
					Milik Daerah				diinventarisis		0	daerah yang diinventarisis		
				08	penilaian barang milik				Jumlah penilaian publik untuk	1 kali	100.000.00	Jumlah penilaian publik	1 kali	162.000.000
					daerah				pemanfaatan BMD		0	untuk pemanfaatan BMD		
				09	pengawasan dan				Jumlah peserta yang aset daerah	2 unit	609.582.22	Jumlah peserta yang aset	2 unit	177.423.000
					pengelolaan barang				yang terfasilitai dalam rangka		8	daerah yang terfasilitai		
					milik daerah				optimalisasi penggunaan BMD			dalam rangka optimalisasi		
				11	Rekonsiliasi dalam				Jumlah peserta yang	100 peserta		Jumlah peserta yang	100 peserta	91.500.000
				''	rangka penyusunan				melaksanakan kegiatan	100 0000110		melaksanakan kegiatan	i oo poodita	01.000.000
					laporan barang milik				rekonsiliasi aset dalam 1 tahun			rekonsiliasi aset dalam 1		
					daerah				Tottoriomasi assi asiam Tianan			tahun		
				12	Penyusunan laporan			 	Jumlah dokumen Japoran milik	2 dok	246.000.00	Jumlah dokumen laporan	2 dok	270.000.000
				'-	barang milik daerah				daerah se Kota Blitar	2 don	0	milik daerah se Kota Blitar	2 doi:	270.000.000
				13	Pembinaan				Jumlah peserta pembinaan	150 org	132.745.80	Jumlah peserta	150 org	32.304.000
					pengelolaan barang				pengelolaan barang milik daerah	1.00 0.9	0	pembinaan pengelolaan	100 0.9	02.001.000
					milik daerah				poligoloidan salang mini adolan			barang milik daerah		
					pemerintah kab/kota					1		barang mink daoran		
5	02	02			PROGRAM	Persentase	Persentase	 	Persentase peningkatan tertib	100 %	9.672.601.6	Persentase peningkatan	100%	9.698.818.500
" "	V2	02			PENGELOLAAN	peningkata	peningkatan		perencanaan keuangan daerah	100 /0	00	tertib perencanaan	100%	0.000.010.000
					KEUANGAN DAERAH	n tertib	tertib		perentalia kedangan daeran		"	keuangan daerah		
					TIEGA III GA III GA III GA III	perencanaa	perencanaan					incoungui auciui		
						n keuangan	keuangan							
						daerah	daerah							
5	02	02	2.01		Koordinasi dan	uuorun	ductuii	 	Persentase rencana anggaran	+	 	Persentase rencana		
" '	V2	02	2.01		penyusunan rencana				daerah yang telah			anggaran daerah yang		
					anggaran daerah				dikoordinasikan dan disusun.			telah dikoordinasikan		
					aliyyalali uaciali				uikoolulliasikali uali uisusuli.			dan disusun.		
												dan disusun.		
$\vdash \vdash$	\dashv		 	04	Koordinasi			 	Jumlah aplikasi SIPEKS	1 aplikasi	546.704.90	Jumlah aplikasi SIPEKS	1 aplikasi	552.829.300
				0-	penyusunan dan				odililali aplikasi oli Lito	ι αμιικασι	0	Julilian aplikasi OIF LNO	ι αμικασι	302.023.300
			1	1	verifikasi perubahan					1	"		1	
				RKA-SKPD					1					
	-+		1	1401 0141 0			 	Jumlah dokumen pengendalian	4 dok	 	Jumlah dokumen	4 dok		
						anggaran yang tersusun	1 4 UUK		pengendalian anggaran	- uok				
								anggaran yang tersusun	1		yang tersusun			
-			-	 				+ +	lumlah dakuman nanyususas	1 dok	 	Jumlah dokumen	1 dok	
									Jumlah dokumen penyusunan	I UUK		1	I UUK	
									analisa standar belanja	1		penyusunan analisa		
_					ļ				handah dalam	4 4-1	 	standar belanja	4 dala	
			1	1	1				Jumlah dokumen rancangan	4 dok		Jumlah dokumen	4 dok	
			ı	ı		ı	I	1 1	regulasi pengelolaan keuangan	I	1 1	rancangan regulasi	I	i

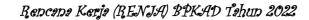




								daerah			pengelolaan keuangan daerah		
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Perda Kepala Daerah tentang penjabaran APBD			Jumlah Aplikasi SIPAPBD	1 Aplikasi	1.124.964.6 00	Jumlah Aplikasi SIPAPBD	1 Aplikasi	1.149444.100
								Jumlah dokumen rancangan perda tentang APBD dan rancangan perwali tentang penjabaran APBD	2 dokumen		Jumlah dokumen rancangan perda tentang APBD dan rancangan perwali tentang penjabaran APBD	2 dokumen	
								Jumlah dokumen rancangan perda tentang P APBD dan rancangan perwali tentang penjabaran P APBD	2 dokumen		Jumlah dokumen rancangan perda tentang P APBD dan rancangan perwali tentang penjabaran P APBD	2 dokumen	
								Jumlah peserta Bintek / sosialisasi penyusunan APBD	110 org		Jumlah peserta Bintek / sosialisasi penyusunan APBD	110 org	
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PERSENTA SE PENINGKA TAN TERTIB PERENCAN AAN KEUANGA N DAERAH	PERSENTASE PENINGKATAN TERTIB PERENCANAAN KEUANGAN DAERAH						
5	02	02	202		Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	persentase penyerapan anggaran diatas 85 %	persentase penyerapan anggaran diatas 85 %			464.962.30 0			496.289.200
				03	Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD			Jumlah anggaran kas yang tersusun	2 dok	700.000	Jumlah anggaran kas yang tersusun	2 dok	700.000
								Jumlah SPD yang diterbitkan	272 SPD		Jumlah SPD yang diterbitkan		
				01	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah			Jumlah Dokumen serapan anggaran kas yang dimonitoring dan dievakuasi	272 lap	206.010.50 0	Jumlah Dokumen serapan anggaran kas yang dimonitoring dan dievakuasi	25 lap	305.819.500
								Jumlah laporan dana perimbangan dan dana transfer lainnya yang dimonev	25 lap		Jumlah laporan dana perimbangan dan dana transfer lainnya yang dimonev	25 lap	
								Jumlah laporan investasi dalam dan penyertaan modal yang dimonev	28 lap		Jumlah laporan investasi dalam dan penyertaan modal yang dimonev	28 lap	
\Box								Jumlah lembar SP2D dalam	18.000 lbr		Jumlah lembar SP2D	18.000 lbr	

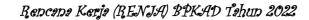


								setahun			dalam setahun		
								Jumlah peeliharaan aplikasi SIPKD	1 aplikasi		Jumlah peeliharaan aplikasi SIPKD	1 aplikasi	
				07	Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan / pemotongandan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK)			Jumlah dokumen SP2B yang diterbitkan	36 dok	2.449.400	Jumlah dokumen SP2B yang diterbitkan	36 dok	2.449.400
					ga (· · · · ·)			Jumlah laporan BUD yang	245 lap		Jumlah laporan BUD	245 lap	
								disusun			yang disusun		
								Jumlah laporanyang disusun DTH	24 lap		Jumlah laporanyang disusun DTH	24 lap	
								Jumlah laporan posisi kas dan prakiraan belanja yang tersusun	24 lap		Jumlah laporan posisi kas dan prakiraan belanja yang tersusun	24 lap	
				09	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait			Jumlah berita acara rekonsiliasi laporan fungsional	356 Berita acara	64.356.300	Jumlah berita acara rekonsiliasi laporan fungsional	356 Berita acara	64.356.300
								Jumlah laporan fungsional belanja dan pendapatan OPD	1068 laporan		Jumlah laporan BUD yang tersusun	245 laporan	
				11	Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kab / kota			Jumlah dokumen rekon PT Taspen dan BPJS kota blitar dalam setahun	6 dok	191.446.10 0	Jumlah dokumen rekon PT Taspen dan BPJS kota blitar dalam setahun	6 dok	122.944.000
								Jumlah dokumen SKPP kota blitar dalam setahun	100 dok		Jumlah dokumen SKPP kota blitar dalam setahun	100 dok	
								Jumlah dokumen SP2B BLUD yang diterbitkan	12 dok		Jumlah dokumen SP2B BLUD yang diterbitkan	12 dok	
								Jumlah dokumen SP2B BOS dalam setahun	684 dok		Jumlah dokumen SP2B BOS dalam setahun	684 dok	
5	02	2 02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	100%		persentase penyusunan laporan keuangan daerah tepat waktu			persentase penyusunan laporan keuangan daerah tepat waktu		
			2.01		Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah					535.965.40 0			500.275.900
			2.03	02	Rekonsiliasi dan verifikasi aset , kewajiban, ekuitas, pendapatan belanja pembiayaan ,			Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD hasil rekonsiliasi	402 dok	113.381.00 0	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD hasil rekonsiliasi	402 dok	91.340.900





					 Т					Т		ı
				pendapatan LO dan Beban								
		1	03.	Koordinasi dan		Jumlah laporan keuangan	1 dokumen	47.701.900		Jumlah laporan keuangan	1 dokumen	45.800.900
			03.	penyusunan laporan		semesteran dan prognosis untuk 6	i dokumen	47.701.300		semesteran dan	i dokumen	45.000.500
				pertanggungjawaban		bulan berikutnya				prognosis untuk 6 bulan		
				pelaksanaan APBD		bulan benkunya				berikutnya		
				Bulanan, tribulanan						bornaarya		
				dan semester								
			04	Konsolidasi laporan		Jumlah laporan keuangan	1 dokumen	1.328.000		Jumlah laporan keuangan	1 dokumen	800.900
				keuangan SKPD,		konsolidasi				konsolidasi		
				BLUD dan laporan								
				keuangan PEMDA								
		2	04	Penyusunan		Jumlah dokumen tanggapan /	1 dokumen	917.800		Jumlah dokumen	1 dokumen	575.800
				tanggapan / tindak		tindak lanjut LHP BPK				tanggapan / tindak lanjut		
				lanjut terhadap LHP						LHP BPK		
				BPK atas laporan pen								
				pelaksanaan								
				APBDrtanggungjawaba								
		2	05	Konsolidasi dan		Jumlah dokumen rancangan	2 dokumen	122.926.80		Jumlah dokumen	1 dokumen	123.716.800
				penyusunan		perda dan perwalikota tentang		0		rancangan perda dan		
				rancangan perda		peertanggungjawaban				perwalikota tentang		
				tentang		pelaksanaan APBD				peertanggungjawaban		
				pertanggungjawaban						pelaksanaan APBD		
				pelaksanaan APBD								
				propinsi dan								
				rancangan peraturan								
				kepala daerah tentang penjabaran								
				penjabaran pertanggungjawaban								
				pelaksanaan APBD								
i				kab/ kota								
		2	.08	Penyusunan analisis		Jumlah dokumen analisis laporan	1 dokumen	902.400		Jumlah dokumen analisis	1 dokumen	760.400
		-		laporan		pertanggungjawaban pelaksanaan		55255		laporan	. donamon	7 001 100
				pertanggungjawaban		APBD				pertanggungjawaban		
				pelaksanaan APBD						pelaksanaan APBD		
		2	.09	Penyusunan kebijakan		Jumlah dokumen kebijakan	1 dokumen	176.187.00		Jumlah dokumen	1 dokumen	151.220.000
				dan panduan teknis		akuntansi		0		kebijakan akuntansi		
				operasional								
				penyelenggaraan								
				akuntansi pemerintah								
				daerah								
		2	10	Penyusunan sistem		Jumlah dokumen sistem dan	1 dokumen	57.918.200	J	Jumlah dokumen sistem	1 dokumen	59.500.200
				dan prosedur		prosedur akuntansi dan				dan prosedur akuntansi		
				akuntansi dan		pelaporan keuangan pemerintah			J	dan pelaporan keuangan		
				pelaporan keuangan		daerah				pemerintah daerah		
$\vdash \vdash$	_	-		pemerintah daerah		Unavada sistem informasi	1 kali	 		Unavada sistem info	1 kali	
						Upgrade sistem informasi	ı kalı			Upgrade sistem informasi	ı kalı	
						pengelolaan keuangan daerah				pengelolaan keuangan daerah		
					l l	I				uaeidii		





			2	11	Pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan			Jumlah pembinaan / sosiali yang terlaksana	sasi 100 org	14.702.300	Jumlah pembinaan / sosialisasi yang terlaksana	100 org	21.560.000
					keuangan pe2merintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah								
5 02	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkata n target pendapatan pajak daerah	Persentase peningkatan target pendapatan pajak daerah			2.838.995.1			3.236.658.974
					Pengelolaan			Jumlah dokumen penetar	oan		Jumlah dokumen		
			2	02.01	Pendapatan daerah Analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah			pajak Jumlah dokumen potensi si sumber pendapatan daerah		162.154.10 0	Jumlah dokumen potensi sumber sumber pendapatan daerah	3 dokumen	148.217.800
			2	02.02	Penagihan pajak daerah			Jumlah jenis piutang pajak daerah	5 pajak	1.225.593.7 00	Jumlah jenis piutang pajak daerah	5 pajak	1.629.821.824
								Jumlah wajib pajak yang menyelesaikan kewajiban	49095 wp		Jumlah wajib pajak yang menyelesaikan kewajiban	49095 wp	
				01.09	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah			Jumlah dokumen keberatar pajak daerah	wajib 215 dokumen	201.876.00	Jumlah dokumen keberatan wajib pajak daerah	215 dokumen	196.603.600
								Jumlah peserta sosialisasi publikasi pajak daerah	100 org		Jumlah peserta sosialisasi publikasi pajak daerah	100 org	
				01.05	Pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah			Jumlah jenis pajak yang dimutakhirkan	9 jenis pajak	215502.35	Jumlah jenis pajak yang dimutakhirkan	9 jenis pajak	272.682.150
			2	02.03	Penilaian pajak bumii dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2) serta Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)			Jumlah Idokumen penetapa pajak	in 47950 wp	478.265.30 0	Jumlah dokumen penetapan pajak	47950 wp	478.265.300
			2.01	06	Pengolahan pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah			Jumlah media publikasi hin pajak daerah	bauan 6 buah	555.603.70 0	Jumlah media publikasi himbauan pajak daerah	6 buah	511.063.300
					. ,			Jumlah paket sistem aplika pengelolaan sarana prasar pajak daerah yang terpeliha	ana ara		Jumlah paket sistem aplikasi pengelolaan sarana prasarana pajak daerah yang terpelihara	3 aplikasi	
								Jumlah data PBB P 2 yang dimutakhirkan	telah 50.000 spt		Jumlah data PBB P 2 yang telah dimutakhirkan	50.000 spt	



Rencene Kerje (RENIA) BPKAD Tehun 2022

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) BPKAD Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD tahun 2022 sebagai penjabaran Renstra BPKAD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2022. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2020.

1.1 Catatan penting dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) BPKAD Kota Blitar Tahun 2022, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2022. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di BPKAD harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program,

1.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf BPKAD Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2022 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- 2. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya
- 3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022.



1.3 Rencana Tindak lanjut

Dalam menghadapi tugas perencanaan yang semakin kompleks, BPKAD Kota Blitar memerlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Dalam rangka sinergitas penatausahaan keuangan untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas penata usahaan keuangan dan aset daerah, harus dilaksanakan lebih intensif, agar proses yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Peningkatan kapasitas SDM aparatur penatausahaan keuangan dalam rangka melaksanakan tugas yang semakin kompleks. Upaya peningkatan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur.
- c. Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2022, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan beedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Badan Pendapatan Keuangan dan aset Daerah Kota Blitar tahun 2022. Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Keuangan dan Aset daerah Kota Blitar juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh aparatur Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Blitar,

2021

KEPALA BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR

WIDODO SAPTONO J.S.Sos., M.AB

Pembina Utama Muda NIP.19710224 199703 1 00



1.3 Rencana Tindak lanjut

Dalam menghadapi tugas perencanaan yang semakin kompleks, BPKAD Kota Blitar memerlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Dalam rangka sinergitas penatausahaan keuangan untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas penata usahaan keuangan dan aset daerah, harus dilaksanakan lebih intensif, agar proses yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Peningkatan kapasitas SDM aparatur penatausahaan keuangan dalam rangka melaksanakan tugas yang semakin kompleks. Upaya peningkatan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur.
- c. Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2022, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan beedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Badan Pendapatan Keuangan dan aset Daerah Kota Blitar tahun 2022. Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Keuangan dan Aset daerah Kota Blitar juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh aparatur Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Blitar, 2021

KEPALA BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN

ASET DARRAL KOTA BLITAR

BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERA

WIDODO SAPTONO J.S.Sos.,M.AB

Pembina Utama Muda

NIP.19710224 199703 1 00